GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**:26/11/2004**
Subyek	**:**	**Hari**	**: Jum'at**
Kata Kunci	**:**	**Halaman**	**:11**



KASUS BUYAT - Menteri Lingkungan Hidu Rachmat Witoelar menyimak uraian deputi tentang kasus Buyat dalam rapat kerja deng Komisi VII DPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11

Komisi VII DPR Dukung Sikap Pemerintah Tindak Tegas PT NMR

JAKARTA - Setelah melalui pembicaraan yang terkadang bertele-tele, Komisi VII DPR akhirnya menyatakan dukungan kepada sikap pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pencemaran di Teluk Buyat. Komisi VII juga menyarankan pemerintah segera melakukan gugatan kepada PT Newmont Minahasa Raya (MNR) yang menurut hasil temuan Tim Terpadu kasus Buyat terbukti melakukan pencemaran. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian, malah mengusulkan agar pemerintah segera mengajukan gugatan terhadap PT NMR melalui Arbitrase Internasional. Ramson tidak menjelaskan secara tegas argumen hukum yang memberikan kemungkinan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengajukan gugatan melalui Arbitrase Internasional.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam kesempatan yang sama kembali menegaskan, pemerintah akan mendesak pengusutan kasus pencemaran di Teluk Buyat secara pidana. Ia belum menjelaskan secara terperinci langkah hukum lain terhadap PT NMR. Semua tanggapan dan pernyataan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dengan Komisi VII di Jakarta, Kamis (25/11). Selain membahas kasus Buyat, rapat juga membahas masalah bentrokan warga Bojong, Kabupaten Bogor dengan polisi dalam kasus tempat pengolahan sampah.

Masalah lain yang menarik perhatian anggota Komisi VII ialah pencemaran minyak di perairan kepulauan Seribu. Suasana rapat berlangsung hangat karena hampir semua anggota Komisi VII ingin mengajukan pertanyaan kepada Menteri Negara Lingkungan. Dari 47 anggota Komisi VII yang hadir, 23 anggota diantaranya mengajukan pertanyaan. Beberapa di antara anggota DPR mengajukan pertanyaan yang hampir serupa dengan anggota lainnya. Akibatnya, Rachmat Witoelar hanya punya waktu sekitar 40 menit untuk menjawab 23 pertanyaan. Dengan diplomatis Rachmat menjelaskan bahwa dirinya hanya bisa menjawab sebagian pertanyaan yang diajukan anggota Komisi VII. Pertanyaan-pertanyaan lainnya akan dijawab secara tertulis.

Menjawab pertanyaan mengenai kasus Buyat, Rachmat menjelaskan bahwa Menko Kesra Alwi Shihab telah menerima rekomendasi dari tim verifikasi yang dikoordinir Menteri Negara Ristek dan Teknologi. Tim verifikasi menegaskan bahwa kesimpulan Tim Terpadu kasus Buyat bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan di kawasan tersebut telah cukup memadai. Sementara itu, Penasihat Hukum PT NMR, Luhut Pangaribuan menanggapi hasil dengar pendapat Komisi VII dengan Tim Teknis menegaskan bahwa PT NMR yakin bahwa perusahaan pertambangan tersebut telah mematuhi seluruh peraturan pemerintah Indonesia dan ketentuan AMDAL dalam pelaksanaan operasi tambangnya di Minahasa dan, jika diperlukan pihaknya bersedia untuk menjelaskannya di pengadilan.

"Kami yakin bahwa pada akhirnya masyarakat akan melihat bahwa PT NMR telah bertindak dengan benar dan bertanggung jawab sebagai perusahaan tambang," ujar Luhut. Ditambahkan, laporan Tim Teknis Menunjukan bahwa air dan ikan di teluk buyat tidak tercemar. Meski terjadi peningkatan kadar arsen dan merkuri dalam sedimen tailing, kedua logam tersebut berada dalam bentuk kondisi stabil sehingga tidak berdampak pada air laut sebagaimana yang ditunjukkan dalam hasil pemantauan yang telah dilakukan selama beberapa tahun dan hasil data ilmiah Tim Teknis itu sendiri.